



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS SOSIAL

KABUPATEN KUTAI TIMUR



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Sosial merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2025. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke 5 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Sosial. Kinerja Dinas Sosial diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2025.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Sosial Tahun 2025 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Sosial pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.



Kabupaten Kutai Timur, 25 Februari 2026

KEPALA DINAS SOSIAL

KABUPATEN KUTAI TIMUR




Dr. H. Ernata Hadi Sujito, S.Sos., M.Si
NIP. 19720805 200112 1 007
Pembina Tingkat I (IV/b)



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN	2
	A. Latar Belakang	2
	B Struktur Organisasi dan Tata Kerja	3
	C Isu Strategis Perangkat Daerah	6
	D Landasan Hukum	7
	E Sistematika	7
BAB II	PERENCANAAN KERJA	
	A Rencana Strategis	
	B Rencana Kerja 2025	
	C Perjanjian Kinerja 2025	
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	
	A Capaian Kinerja Organisasi	
	B Realisasi Anggaran	



	C	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber daya	
BAB IV	P E N U T U P		
LAMPIRAN			
PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH			

BAB I PENDAHULUAN





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Sosial selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas



dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur Dinas Sosial mempunyai tugas: membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintah Bidang Sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud kepala Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan dan penetapan Rencana Startegis Organisasi Dinas Sosial berdasarkan rencana Pembangunan jangka Menengah Pemerintah Daerah;
- Perumusan pelaksanaan, pengembangan dan pengendalian kebijakan dibidang social yang menjadi kewenagan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
- Pendistribusian tugas kepada Sekretaris, kepala Bidang social unit pelaksana Teknis daerah dan kelompok jabatan fungsional;
- Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan organisasi program dengan organisasi perangkat daerah lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;

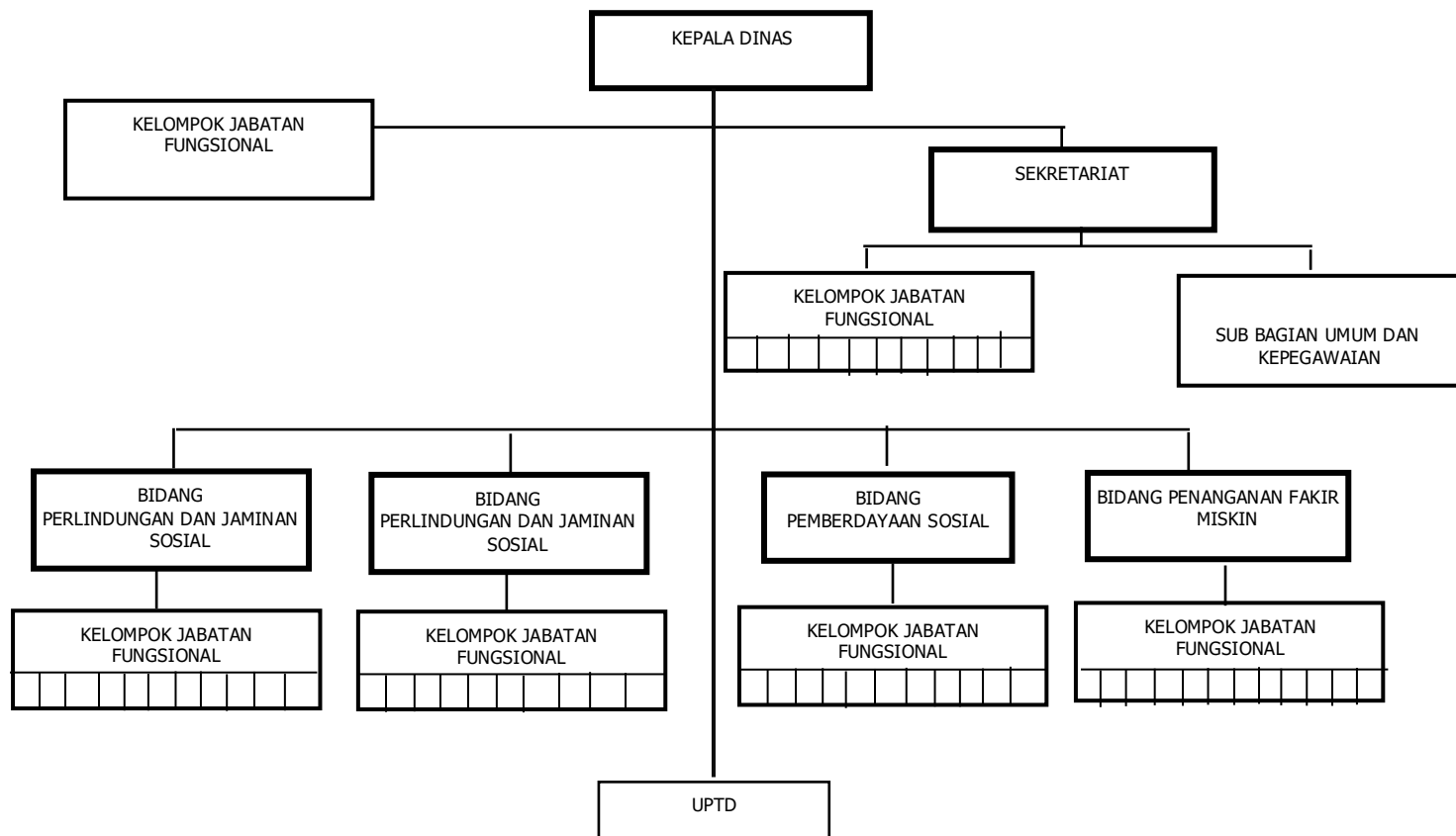


- Penandatanganan naskah dinas berdasarkan kewenaganya sebagai kepala Dinas Sosial untuk keabsahan naskah Dinas;
- Penjalinan Kerjasama dengan Isntansi lain atau mitra kerja untuk keberhasilan program kerja Dinas social;
- Pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan kepada Sekretaris, Kepala Bidang Sosial, Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinsos sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- Pengevaluasian pelaksanaan program Sekretaris, Kepala Bidang sosial, Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya;
- Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati secara lisan maupun tertulis untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Inspektur sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kepala Bidang rehabilitasi Sosial, Kepala Bidang Pemberdayaan social, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Dalam setiap bagian unit pelaksana teknis daerah dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur.



Gambar 1.1.
Struktur Organisasi



A. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

- Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Sosial periode 2021- 2026 sebagai berikut : Meningkatkan pelayanan dan perlindungan sosial bagi PMKS.
- Jumlah populasi RTSM dan PMKS semakin meningkat.



- c. Meningkatkan fasilitasi sarana dan prasarana pelayanan dan rehabilitasi sosial.
- d. Meningkatkan jangkauan pembinaan KUBE terhadap PMKS.
- e. Meningkatkan persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.
- f. Meningkatkan upaya perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat
- g. Meningkatkan Pembinaan dan pemberdayaan PSKS, Lembaga kesejahteraan, Masyarakat Miskin dan rentan
- h. Memvalidasi dan verifikasi data DTKS

Perumusan Isu strategis pada tahun 2025 mengacu pada Renstra Dinas Sosial periode 2021-2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2025 sebagai berikut :

- 1. Belum update Data By name by Address PMKS
- 2. Belum Optimalnya pelayanan di Rumah Pelayanan Sosial
- 3. Masih kurang tenaga Peksos yang sesuai dengan kelulusan
- 4. Belum memiliki Perda terkait penanganan PMKS
- 5. Belum Memiliki post pengaduan di kecamatan
- 6. Belum optimalnya perbaikan Data DTKS

B. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Sosial ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

- 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian



Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
5. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 63 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
6. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Satuan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kutai Timur

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 adalah :

BAB I	PENDAHULUAN
	Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah.
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.
BAB IV	PENUTUP





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kabupaten Kutai Timur. Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas social Kabupaten Kutai Timur tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas sosial Kabupaten Kutai Timur tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Visi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 adalah:



“Menata Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua”

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- Misi 1 : Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu
- Misi 2 : Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat Berbasis Sektor Pertanian
- Misi 3 : Mewujudkan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata
- Misi 4 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Partisipatif Berbasis Penegakan Hukum Dan Teknologi Informasi
- Misi 5 : Mewujudkan Sinergitas Pengembangan Wilayah dan Integrasi Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Sosial mengacu pada Misi ke-1, yaitu:

Mewujudkan Masyarakat yang berakhlak Mulia, berbudaya dan Bersatu

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 sebanyak 3 (tiga) tujuan dan 3 (tiga) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut :



Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan taraf kesejahteraan social penduduk miskin dan rentan	Meningkatnya kondisi social ekonomi penduduk miskin dan rentan	Persentase Jumlah PMKS yang mendapat layanan Sosial	61,80	61,80	63	65	67
	Meningkatkan pemenuhan Perlindungan dan Jaminan sosial bagi masyarakat	Meningkatnya pemenuhan perlindungan dan jaminan Sosial Bagi Masyarakat	Persentase jumlah penduduk miskin yang mendapatkan bantuan sosial	54,53	54,53	68,74	68,74	68,74
	Terwujudnya tata Kelola dibidang sosial yang akuntabel	Terpenuhinya Tata Kelola administrasi perkantoran dan laporan keuangan	Peningkatan efektivitas dan efisiensi perencanaan, pengelolaan manajemen perkantoran dan keuangan	61,68	61,80	70	75	80

Sumber : Renstra Dinas Sosial periode 2021-2026

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur tahun 2023 adalah sebagai berikut:



Adapun penyajian Indikator Kinerja Utara (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Kutai timur adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama

Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatkan taraf kesejahteraan social penduduk miskin dan rentan	1. Persentase jumlah PMKS yang mendapat layanan sosial	%	Jumlah PMKS yang dilayani dan yang dihasilkan pada tahun berjalan dibagi jumlah PMKS yang ada dikabupaten kutai Timur	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang dilayani}}{\text{Jumlah PMKS yang seharusnya dilayani selama 1 tahun}} \times 100$	Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan jaminan Sosial, Bidang Penanganan Fakir Miskin
		2. Persentase jumlah penduduk miskin yang mendapatkan bantuan sosial	%	Jumlah orang miskin yang mendapatkan bantuan sosial Pada saat tahun berjalan dibagi jumlah penduduk miskin	$\frac{\text{Jumlah orang miskin yang mendapat bantuan sosial dan perlindungan sosial}}{\text{Jumlah Penduduk miskin}} \times 100$	Bidang Penanganan Fakir Miskin



			Peningkatan efektivitas dan efisiensi perencanaan, pengelolaan manajemen perkantoran dan keuangan		Efektifitas dan efisiensi dokumen dan pelaporan, manajemen perkantoran dan pelaporan keuangan	Jumlah dokumen perencanaan, laporan keuangan dan manajemen perkantoran Jumlah administrasi dan laporan keuangan yang dibuat X 100	Umpeg dan Sekretariat
--	--	--	---	--	---	---	-----------------------

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Tahun 2025 IKU



B. Rencana Kerja Tahun 2025

Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2025 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berikut Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2025 :

Tabel 2.3
Rencana Kerja Tahun 2025
Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan	1. Meningkatnya kondisi sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan	Persentase jumlah PMKS yang mendapat layanan sosial	%	67
2.	Meningkatnya pemenuhan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat	2. Meningkatnya pemenuhan perlindungan sosial bagi masyarakat	Persentase jumlah penduduk miskin yang mendapatkan bantuan sosial	%	68,74



3.	Terwujudnya tata Kelola dibidang sosial yang akuntabel	3	Terpenuhinya tata Kelola administrasi perkantoran dan laporan keuangan	Peningkatan efektivitas dan efisiensi perencanaan, pengelolaan manajemen perkantoran dan keuangan	%	80
----	--	---	--	---	---	----

Sumber : Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur tahun 2025

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Pada tanggal 7 Januari tahun 2025 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur dan pada Tanggal 7 Nopember 2025 ditetapkan Perjanjian Kinerja Perubahan dengan uraian sebagai berikut:

Catatan: utk table 2.4 isiannya PK essl.II sebelum perubahan dan setelah perubahan dan dibuat 2 tabel



Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan taraf kesejahteraan social penduduk miskin dan rentan	Persentase jumlah PMKS yang mendapat layanan sosial	%	67
2	Meningkatnya pemenuhan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat	2 Persentase jumlah penduduk miskin yang mendapatkan bantuan sosial	%	68,74
3	Terwujudnya tata Kelola dibidang sosial yang akuntabel	3 Peningkatan efektivitas dan efisiensi perencanaan, pengelolaan manajemen perkantoran dan keuangan	%	80

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan	18.879.414.528,-	
2.	Program Pemberdayaan Sosial	720.805.200,-	
3.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	7.891.000,-	
	Program Rehabilitasi Sosial	2.343.984.180,-	
4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.682.993.000,-	
5.	Program Penanganan Bencana	2.793.905.505,-	

Sumber : Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Sosial Tahun 2025 (sebelum perubahan)



Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Sosial :

Tabel 2.5

Program dan Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2025

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
A.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PMKS yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial kelompok maupun perorangan	69,84	Rp . 720.805.200-
1.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Sosial dan Lembaga yang ditingkatkan Kemampuannya	505	Rp. 720.805.200-
B	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase warga negara Migran korban tindak kekerasan yang mendapat penanganan	100	Rp. 7.891.000,-
1	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Mendapat Penanganan	1	Rp. 7.891.000,-



C.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh Rehabilitasi Sosial	100 %	Rp. 2.343.984.180,-
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial didiluar panti sosial	100	Rp. 630.605.820,-
2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	369 orang dan lembaga	Rp. 616.522.770,-
D	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	100 %	Rp. 2.793.905.505,-
1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana alam yang Mendapatkan Perlindungan Sosial	2500 KK (11.250) orang	Rp. 2.793.905.505,-
E	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang Mendapat	100%	Rp. 1.682.993.000,-



		Perlindungan dan Jaminan Sosial		
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Fakir Miskin yang Terkelola Mendapat Bantuan Sosial	114935 orang	Rp. 1.682.993.000,-
F	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP/ Presentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	75,61%	Rp. 16.359.351.365,-
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 dok	Rp. 290.631.000,-
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	8 dok	Rp. 13.625.430.849,-
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	4 jenis	Rp 163.736.000,
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	mlah Jenis Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 kegiatan	Rp. 1.525.156.715,-



5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24 laporan	Rp. 797.353.44,-
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang yang Dilakukan Pemeliharaan	267 unit	Rp. 588.221.000,-

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Tahun 2025 (sebelum perubahan)

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 7 bulan November tahun 2025 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dikarenakan Perubahan dalam strategi (efisiensi anggaran) yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) dengan uraian target kinerja sebagai berikut :



Tabel 2.6

Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan taraf kesejahteraan social penduduk miskin dan rentan	1 Persentase Jumlah PMKS yang mendapat layanan sosial	%	65
2	Meningkatnya pemenuhan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat	2 Persentase jumlah penduduk miskin yang mendapatkan bantuan sosial	%	68,74
3	Terwujudnya tata Kelola dibidang sosial yang akuntabel	3 Peningkatan efektivitas dan efisiensi perencanaan, pengelolaan manajemen perkantoran dan keuangan	%	75

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas social Tahun 2025

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan	18.879.414.528-	
2.	Program Pemberdayaan Sosial	720.805.200,-	
3.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	7.891.000,-	
4.	Program Rehabilitasi Sosial	2.343.984.180,-	
5.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1682.993.000,-	
6.	Program Penanganan Bencana	2.793.905.505,-	

Sumber : Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Sosial Tahun 2025 (setelah perubahan)



Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.7
Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2025

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
A.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PMKS yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial kelompok maupun perorangan	69,84	Rp . 720.805.200,-
1.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Sosial dan Lembaga yang ditingkatkan Kemampuannya	505	Rp. 720.805.200-
B	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase warga negara Migran korban tindak kekerasann yang mendapat penanganan	100	Rp. 7.891.000,-
1	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Mendapat Penanganan	1	Rp. 7.891.000,-



C.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh Rehabilitasi Sosial	100 %	Rp. 2.793.905.505,-
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial didiluar panti sosial	80	Rp. 630.605.820,-
2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	310 orang dan lembaga	Rp. 458.358.770,-
D	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	100 %	Rp. 2.793.905.505,-
1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana alam yang Mendapatkan Perlindungan Sosial	2500 KK (11.250) orang	Rp. 2.793.905.505,-
E	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang Mendapat	66,51 %	Rp. 1.682.993.000,-



		Perlindungan dan Jaminan Sosial		
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Fakir Miskin yang Terkelola Mendapat Bantuan Sosial	14189 orang	Rp. 1.682.993.000,-
F	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP/ Presentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	75,85 %	Rp. 16.359.351.365,-
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 dok	Rp. 290.789.990,-
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp. 12.635.830.212,-
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100%	Rp 12.000.000,-
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	mlah Jenis Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 paket	Rp. 1.134.488.715



5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Rp. 797.353.448,-
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang yang Dilakukan Pemeliharaan	4 jenis	Rp. 588.221.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. **Dinas Sosial** Kabupaten Kutai Timur selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi **Dinas Sosial** Kabupaten Kutai Timur.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.



Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja **Dinas Sosial** Tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Sosial



A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, **Dinas Sosial** Kabupaten Kutai Timur juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama **Dinas Sosial** Kabupaten Kutai Timur tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Sosial Tahun 2025

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatkan taraf kesejahteraan social penduduk miskin dan rentan	Persentase jumlah PMKS yang mendapat layanan social	67	67	100	Sangat Tinggi	Bidang Rehabilitasi social, bidang penanganan Fakir Miskin bidang linjamsos dan bidang Pemberdayaan Sosial
	Meningkatnya kondisi social ekonomi penduduk miskin dan rentan						



2	Meningkatnya pemenuhan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat	Persentase jumlah penduduk miskin yang mendapatkan bantuan sosial	68,74	35.31	51.36	Rendah	Bidang Penanganan Fakir Miskin, bidang rehabsos
3	Terwujudnya tata Kelola dibidang sosial yang akuntabel	Peningkatan efektivitas dan efisiensi perencanaan, pengelolaan manajemen perkantoran dan keuangan	80	70	87.50	Sangat Tinggi	Umpeg dan sekretariat

Sumber data :: Bidang Penanganan Fakir Miskin, Bidang Rehabilitasi dan Bidang Linjamsos, Umpeg dan Sekretariat

Dinas Sosial memiliki 3 (tiga) IKU yang menggambarkan capaian kinerja yaitu Persentase jumlah PMKS yang mendapat layanan social sebesar 100 %, kemudian Persentase jumlah penduduk miskin yang mendapatkan bantuan sosial sebesar 51.36% dan Peningkatan efektivitas dan efisiensi perencanaan, pengelolaan manajemen perkantoran dan keuangan sebesar 87.50 %.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2024 diuraikan pada tabel berikut :



Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun ini

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2024			2025		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatkan taraf kesejahteraan social penduduk miskin dan rentan	Persentase jumlah PMKS yang mendapat layanan sosial	65	65	100	67	67	100
	Meningkatkan kondisi social ekonomi penduduk miskin dan rentan							
2	Meningkatkan pemenuhan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat	Persentase jumlah penduduk miskin yang mendapatkan bantuan sosial	68,74	25,62	39,57	68,74	35,31	51,36
3	Terwujudnya tata Kelola dibidang	Peningkatan efektivitas dan efisiensi perencanaan,	75,00	70,00	93,33	80,00	70,00	87,50



	sosial yang akuntabel	pengelolaan manajemen perkantoran dan keuangan						
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Berdasarkan data diatas untuk indikator Persentase jumlah PMKS yang mendapat layanan sosial realisasi kinerja tahun 2024 realisasinya adalah 65,00 dengan capaian 100 Apabila dibandingkan dengan tahun 2025 capaian pada indicator ini tetap sama, walaupun target lebih tinggi dari tahun 2025 tidak mengurangi realisasi capaian tetap 100% realisasi kinerja berada di 67,00 % capaian 100% tergolong **SANGAT TINGGI**

Persentase jumlah penduduk miskin yang mendapatkan bantuan sosial realiasi pada tahun 2024 sebesar 25,62% capaian 39,57 dibanding tahun 2025 realisasi 35.31 dengan capaian 51.36%, mengalami peningkatan tetapi masih tergolong **RENDAH**. Kondisi ini bukan karena tidak adanya penduduk miskin melainkan karena tidak adanya proposal atau usulan yang masuk ke Dinas Sosial sebelum pelaksanaan kegiatan, yang mengakibatkan tidak dapat direalisasikan secara optimal.

Peningkatan efektivitas dan efisiensi perencanaan, pengelolaan manajemen perkantoran dan keuangan dibandingkan dengan tahun 2024 dan 2025 mengalami kenaikan berjenjang yaitu tahun 2024 capaian sebesar 93,33 dan tahun 2025 realisasi 70.00 % capaian sebesar 89.50 tergolong **TINGGI** %



Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis **Dinas Sosial** Kabupaten Kutai Timur periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
1.	Meningkatkan taraf kesejahteraan social penduduk miskin dan rentan	Persentase jumlah PMKS yang mendapat layanan sosial	67	70	95.71
	Meningkatnya kondisi social ekonomi penduduk miskin dan rentan				
2.	Meningkatnya pemenuhan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat	Persentase jumlah penduduk miskin yang mendapatkan bantuan sosial	35.31	68,74	51.36
3.	Terwujudnya tata Kelola dibidang sosial	Peningkatan efektivitas dan efisiensi perencanaan, pengelolaan	70.00	83.00	84.33



	yang akuntabel	manajemen perkantoran dan keuangan			
--	----------------	------------------------------------	--	--	--

Perbandingan realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat pada target jangka menengah Persentase jumlah PMKS yang mendapat layanan social dengan target sebesar 70.00% realisasi sampai dengan tahun ini sebesar **67,00** dengan Tingkat kemajuan capaian sasaran strategis capaian sebesar 95.71 %

Persentase jumlah penduduk miskin yang mendapatkan bantuan sosial capaian pada target jangka menengah 68,74 % realisasi sampai dengan tahun ini sebesar 35.51. dengan Tingkat kemajuan 51.36

Peningkatan efektivitas dan efisiensi perencanaan, pengelolaan manajemen perkantoran dan keuangan target jangka menengah 83,00% realisasi dengan Tingkat kemajuan capaian sasaran stretegis sebesar 84.33%

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.6

Analisis Penyebab Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi yang telah dilakukan

No.	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1.	Meningkatkan taraf kesejahteraan social penduduk miskin dan rentan Meningkatkan kondisi social	Persentase jumlah PMKS yang mendapat layanan sosial	67,00	67,00	100%	1. Bekerjasama dengan BAZNAS 2. Bekerjasama dengan SATPOL PP 3. Bekerjasama dengan TKSK dan PKH 4. Ketersediaan logistic bencana	



ekonomi penduduk miskin dan rentan							
---	--	--	--	--	--	--	--

Tercapainya tujuan I :

Keberhasilan Meningkatkan taraf kesejahteraan social penduduk miskin dan rentan diukur melalui indicator Persentase jumlah PMKS yang mendapat layanan sosial umumnya mencakup kondisi social Masyarakat di Kabupaten Kutai Timur seperti rehabilitasi social, persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tertangani, jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang dibina, pelaksanaan program pemberdayaan sosial.

Tahun 2025 penyebab dari keberhasilannya yaitu :

1. Target yang ditetapkan realistis
2. Adanya Kerjasama dengan Badan amil Zakat BAZNAS
3. Koordinasi dengan instansi terkait misalnya SATPOL PP saat melakukan Razia gepeng, Disdukcapil untuk perekaman orang terlantar yang tidak memiliki identitas

Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat sehingga kinerja realisasi kurang maksimal yaitu:

1. Belum update data PMKS
2. Kurangnya SDM aparatur Jafung Peksos, dimana untuk menangani klien peksos sangat berperan dalam penanganan PPKS
3. Karena klien yang ditangani harus 24 jam, SDM belum mampu untuk bekerja di jam libur atau diluar jam kerja
4. Banyak klien yang ditangani diluar kabupaten Kutai Timur



No.	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
2.	Meningkatnya pemenuhan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat	Persentase jumlah penduduk miskin yang mendapatkan bantuan sosial	68,74	35.31	51.36%	Gagal : 1. Adanya transformasi aplikasi SIKS NG dari DTKS ke DTSEN sehingga menyebabkan byk fitur - fitur baru harus dikenalkan kepada operator DESA serta perubahan data awal DTKS menjadi DTSEN menjadi tidak sama. Ketidak tercapaian program tersebut dikarenakan oleh tidak adanya proposal / usulan dari Desa maupun kecamatan yang masuk pada tahap awal perencanaan 2. Keterbatasan data persasaran yang akurat	1. Memperbaiki data DTKS dengan melakukan verivali data DTSEN desil I dan II 2. Sosialisasi ke Masyarakat untuk mengajukan profosal sesuai rencana bantuan sosial yang dituangkan dalam DPA



Tercapainya Tujuan II :

Meningkatnya pemenuhan perlindungan dan jaminan sosial bagi Masyarakat indicator Persentase jumlah penduduk miskin yang mendapatkan bantuan social dapat diukur melalui sosial umumnya mencakup kondisi social Masyarakat di Kabupaten Kutai Timur seperti rehabilitasi social, ekonomi masyarakat seperti penanganan PPKS, rumah tangga miskin yang diberi bantuan dan pemberdayaan masyarakat

Penyebab dari keberhasilannya Indikator II yaitu :

- Jaminan social melalui BPJS semua di usulan dan Masyarakat yang mengajukan semua dibantu
- Data Miskin Ekstri menurun yang semula dari target 29.634 menjadi 103
- Kerjasama dengan BAZNAS
- Koordinasi antar PKH yang baik

Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat sehingga kinerja realisasi kurang maksimal yaitu:

- Dikarenakan pengusulan proposal untuk UEP tidak
- Adanya transformasi aplikasi SIKS NG dari DTKS ke DTSEN sehingga menyebabkan byk fitur - fitur baru harus dikenalkan kepada operator DESA serta perubahan data awal DTKS menjadi DTSEN menjadi tidak sama
- Proposal tidak ada teregister di awal perencanaan

No.	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
3.	Terwujudnya tata Kelola dibidang sosial yang akuntabel	Peningkatan efektivitas dan efisiensi perencanaan,	80,00	79	87.50%	Kegagalan indikator tersebut karena adanya efisiensi anggaran sebagai tindak lanjut dari arahan	Adanya pengendalian dan evaluasi anggaran secara berkala



		pengelolaan manajemen perkantoran dan keuangan				pemerintah pusat.	
--	--	--	--	--	--	-------------------	--

Selanjutnya, untuk sasaran " Terwujudnya tata Kelola dibidang sosial yang akuntabel".

Adapun penyebab keberhasilan peningkatan kinerja adalah:

- Perencanaan yang matang dan Sumber daya manusia (SDM) yang kompeten
- Koordinasi antar perangkat daerah yang baik
- Pengawasan dan evaluasi rutin

3.1.6. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber daya :

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Dinas sosial merupakan perangkat Daerah yang melaksanakan urusan wajib kebutuhan dasar. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas sosial didukung sumberdaya aparatur serta sarana dan prasarana cukup terbatas. Dari sisi jumlah cukup tersedia sumber daya aparatur untuk pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian perlu adanya peningkatan kapasitas karena dalam pelaksanaannya sumberdaya aparatur tersebut tidak didukung kopetensi yang ada sesuai bidang tugas yang menjadi tanggungjawabnya.

Terkait keterbatasan sarana prasarana Dinas Sosial telah merealisasikan sejumlah peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang operasional dan pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten / kota. Anggaran



dialokasikan sebesar Rp 16.359.351.365 dengan realisasi Rp. 14.034.360.092 atau dengan persentase 85.78%

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.7

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
	Meningkatkan taraf kesejahteraan social penduduk miskin dan rentan	Persentase jumlah PMKS yang mendapat layanan sosial	67 &	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PMKS yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial kelompok maupun peranan	100	
				Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kotora	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan	100	



					Kabupaten/Kota		
				Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	100	
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	100	
				PROGRAM PENANGANA N WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN	Persentase warga negara Migran korban tindak kekerasan yang	100	



				TINDAK KEKERASAN	mendapat penangan an		
				Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kot a untuk dipulangkan ke Desa/Keluraha n Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangk an dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangk an ke Desa/Kelu rahan Asal Kewenang an Kabupate n/Kota	100	
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentas e PMKS yang memperol eh Rehabilita si Sosial	100	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS yang Memperol eh Rehabilita si Sosial diluar panti sosial	100	
				Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendap	46	



					atkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		
				Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	77,5	
				Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu	106,67	



					dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota		
				Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	93,33	
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	228	
				Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial	620	



				Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	kepada Keluarga Penyangga Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		
				Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu	55	



					Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota		
				Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	90	
				Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	1,710	



				Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	612	
				Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	464	
				Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	200	
				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	92,14	



				HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AID S dan NAPZA di Luar Panti Sosial		
				Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendap atkan Layanan Data dan Pengad uan Kewena ngan Kabupat en/Kota	100	
				Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendap atkan Pelayan an Kedarur atan Kewena ngan Kabupat en/Kota	100	
				Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang	76,67	



					yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		
				Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	20,37	
				Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan	13,04	



					Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota		
				Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	70	
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan	100	



					Kabupat en/Kota		
				Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberi an Bimbing an Sosial kepada Keluarg a Penyan dang Masalah Kesejaht eraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AID S dan NAPZA Kewena ngan Kabupat en/Kota	100	
				Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membut uhkan Pembua tan Nomor Induk Kepend udukan,	24	



					Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota		
				Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan	100	



					Kabupat en/Kota		
				Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendap atkan Pelayan an Penelus uran Keluarg a Kewena ngan Kabupat en/Kota	100	
				Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendap atkan Pelayan an Reunifik asi Keluarg a Kewena ngan Kabupat en/Kota	1,00	
				Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendap atkan Layanan Rujukan Kewena ngan	80	



					Kabupaten/Kota		
				Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	100	
	MENINGKATKAN PEMENUHAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT	PERSENTASE JUMLAH PENDUDUK MISKIN YANG MENDAPATKAN BANTUAN SOSIAL	51.36 %	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial	35,51	
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Fakir Miskin yang Terkelola Mendapat Bantuan Sosial	100	
				Pendataan Fakir Miskin Cakupan	Jumlah Fakir Miskin	9.24	



				Daerah Kabupaten/Kot a	Cakupan Daerah Kabupate n/Kota yang Didata		
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Keluarga yang Mendapat kan Pengentas an Fakir Miskin Kabupate n/Kota	27.73	
				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapat kan Bantuan Sosial Kesejahter aan Keluarga Kewenang an Kabupate n/Kota	10.87	
				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentas e Warga Negara Korban Bencana yang memperol eh Perlindung an dan Jaminan Sosial	100	
				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Jumlah korban bencana alam yang Mendapat	100	



				Kabupaten/Kota	kan Perlindungan Sosial		
				Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100	
				Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	6.00	
				Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan	100	



					Kabupaten/Kota		
				Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	8,57	
				Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	30,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP/ Presentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	87.50 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP/ Presentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	87.50%	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	



				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	100	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	



				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Pelayanan Admini strasi Kepega waian	100	
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas & Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Penyediaan Adminis trasi Umum Perangka t Daerah	100	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediaka n	100	
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang	100	



				disediakan		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Disediakan	83,33	
			Penatausahaan Arsip	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip	100	



			Dinamis pada SKPD	Dinamis pada Keuangan		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	100	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemanfaatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	100	



				Pemerintahan Daerah		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang yang Dilakukan	100	



				Pemeliharaan		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	100	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	100	



				ra/Direh abilitasi		
--	--	--	--	-----------------------	--	--

Pendukung dari sebuah program adalah kegiatan dan sub kegiatan, disetiap program dan kegiatan masing- masing ada yang berhasil ada yang gagal. Program dan kegiatan tahun 2025.

Dinas Sosial merupakan kegiatan yang program perlindungan dan dan jaminan social dengan sub kegiatan fasilitas bantuan social kesejahteraan keluarga tidak tercapai, capaian nol dikarenakan bantuan berpotensi tidak efisien, tidak efektif tidak tepat sasaran dan pemberian bantuan tidak tercapai. Sub kegiatan penanganan warga negara Migran tercapai karena ada koordinasi ke provinsi untuk pemulangan Migran dari target 100%. Tetapi untuk keberhasilan berada pada program rehabilitasi social melebihi target kinerja karena ada beberap aktivitas penangan klien yang dibantu melalui BAZNAS, Kerjasama dengan SATPOL PP dan Kerjasama dengan PKH dan TKSK

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.359.351.365	14.034.360.092	85.78
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	290.789.990	268.114836	92.20



1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.635.830.212	10.490.295.287	82.50
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	390.668.000	389.387.000	91.26
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	789.353.448	784.324.584	91.26
1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	588.221.000	559.899.061	95.19
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	720.805.200	715.158.015	99.22
2.1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	720.805.200	715.158.015	99.22
3.	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	7.891.000	7.891.000	0
3.1	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekkerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	7.891.000	7.891.000	0
4.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.247.128.590	890.216.610	70.93
4.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	723.799.820	433.527.413	68.75
4.2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	458.358.770	336.298.128	73.37
5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.682.993.000	1.089.498.329	64.74
5.1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.682.993.000	1.089.498.329	68.74
6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	2.793.905.505	2.478.257.478	88.70
6.1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	2.793.905.505	2.478.257.478	88.70

Penyerapan Anggaran Belanja Langsung pada tahun 2025 sebesar 84,20% dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per



sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada Program Pemberdayaan Sosial sebesar Rp. 715.158.015 (99,22%). Srapan dan realisasi keuangan yang sangat tinggi dibandingkan dengan bidang lainnya. Kegiatan yang sistematis, serta pengendalian pelaksanaan program yang dilakukan secara konsisten Tingginya realisasi keuangan tersebut tidak lepas dari perencanaan yang matang, penyusunan jadwal karena beberapa factor yaitu kegiatan Pelatihan untuk. Program Penunjang Urusan Rp. 16.359.351.365 (85.78%). Tidak terealisasi 100% karena standar harga yang sangat tinggi salah satu factor juga yang mempengaruhi anggaran tidak mencapai 100% dan waktu pelaksanaan sampai akhir tahun sangat pendek, dan ada siva gaji sebesar 2.000.000.000,- (dua milyar) Program Rehabilitasi Sosial sebesar Rp.1.255.019.590,- (890,216,610%). Realisasi (70,93) ada bantuan permakanan, sandang dan alat bantu tidak dilaksanakan karena tidak ada proposal yang diusulkan kedinas sosial, sehingga anggaran tidak terserap. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban tindak kekerasan 7.891.000,- (0). Pemulangan warga Negara Migran hanya sampai pada provinsi, tidak sampai ke Daerah Asal dan kegiatan untuk pengnataran klien menggunakan anggaran program Rehabilitasi. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar Rp.1.682.993.000 Program Penanganan Bencana sebesar Rp.2.793.905.505 (88.70)

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No .	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
1.	Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial	65	65	100	4.769.730.295	4.083.632.103	85.61	1.79



	penduduk miskin dan renta							
2.	Meningkatnya pemenuhan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat	68,74	25,62	39,57	1.682.993.00	1.089.498.329	64.74	3.85
3.	Terwujudnya tata Kelola dibidang sosial yang akuntabel	75	70	93,33	16.359.351.365	14.034.360.092	85.78	5.24

Belum tercapainya tujuan dan sasaran terkait pelaksanaan di Dinas Sosial terdapat 3 (tiga) indicator kinerja telah ditetapkan dengan target dan realisasi yang telah dicapai. Berdasarkan analisis keberhasilan dan Solusi yang dilakukan untuk setiap indicator kinerja dapat disimpulkan bahwa Upaya yang dilakukan telah menghasilkan hasil Persentase Jumlah PMKS yang mendapat layanan social dan anggaran terhadap meningkatkan taraf kesejahteraan social penduduk miskin dan rentan dengan sasaran meningkatnya kondisi social ekonomi penduduk miskin dan rentan bahwa capaian kinerja sangat baik dan anggaran kinerja juga sangat efisien. Sedangkan indicator Meningkatnya pemenuhan perlindungan dan jaminan sosial bagi Masyarakat belum tercapai sesuai Analisa table sebelumnya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan



No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	75	70	93.57	16.359.351.365	14.034.360.092	2.266,14	Tinggi
1.1	Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	10	100	290.789.990	268.114.836	92.20	Sangat Tinggi
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	12.635.830.212	10.490.295.287	82.50	Tinggi
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	100	390.668.000	389.387.000	91.26	Sangat Tinggi
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	789.353.448	784.324.584	91.26	Sangat Tinggi
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5	0	0	588.221.000	559.899.061	95.19	Sangat Tinggi
1.7.	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang urusan daerah	100	100	100	510 000 000	495 060 000	97.07	Sangat Tinggi



2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	69,84	64,28	95,44	720.805.200	715.158.015	99.22	Sangat Tinggi
2.1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	505	187	37,02	720.805.200	715.158.015	99.22	Sangat Tinggi
3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	100 orang	100	100	7.891.000	7.891.000	0	Sangat Rendah
3.1	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	5	5	100	7.891.000	7.891.000	0	Sangat Rendah
4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	100	100	100	1.255.019.590	890.216.610	70.93	
4.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyanggah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	670	217	32,38	723.799.820	433.527.413	68.75	
4.2	Rehabilitasi Sosial nyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	310	217	70,00	458.358.770	336.298.128	73.37	
5	PROGRAM PERLINDUNGAN	100	35.31	35.31	1.682.993.000	1.089.498.329	64.74	



	DAN JAMINAN SOSIAL							
5.2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	113623	40100	35.31	1.682.993.000	1.089.498.329	64.74	
6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	100	100	100	2.793.905.505	2.478.257.478	88.70	
65.3	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	11250	12123	100	2.793.905.505	2.478.257.478	88.70	

BAB IV

PENUTUP





BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi selama Tahun 2025. Laporan ini merupakan implementasi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis dan Perjanjian Kinerja. Capaian kinerja yang diperoleh merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran, dukungan pemangku kepentingan, serta komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan dan kendala dalam pencapaian target kinerja yang menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan pada periode berikutnya. Oleh karena itu, hasil evaluasi dalam laporan ini akan menjadi dasar dalam penyempurnaan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang.

Dinas Sosial memiliki 3 (tiga) IKU yang menggambarkan capaian kinerja yaitu Persentase jumlah PMKS yang mendapat layanan social sebesar 100 %, kemudian Persentase jumlah penduduk miskin yang mendapatkan bantuan sosial sebesar 51.36% dan Peningkatan efektivitas dan efisiensi perencanaan, pengelolaan manajemen perkantoran dan keuangan sebesar 87.50 %.

Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas sosial Kabupaten Kutai Timur dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 22.812.074.660,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.19.207.490.524, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2025 serapan anggaran sebesar 84.20 %.



Demikian LKjIP ini disusun sebagai bentuk komitmen Dinas Sosial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil, serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara berkelanjutan.

Sangatta, 25 Pebruari 2026

DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI TIMUR



Dr. H. Ernata Hadi Sujito, S.Sos, M.Si

NIP. 19720805 200112 1 007

Pembina Tingkat I (IV/b)



Lampiran



RINCIAN HASIL
OPINI OMBUDSMAN RI: PENILAIAN MALADMINISTRASI PELAYANAN PUBLIK
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

Pemerintah Daerah : Pemerintah Kab. Kutai Timur

Unit Layanan : Dinas Sosial

Periode Penilaian : September-November 2025

A. DIMENSI INPUT

A.1. Pengetahuan

No.	Indikator	Bobot	Responden				Hasil Penilaian (%)
			1	2 *	3	4	
1	Pengetahuan tentang lembaga Ombudsman	12.22	20	60	80	100	66
2	Pengetahuan tentang bentuk-bentuk maladministrasi	12.92	60	60	80	100	74
3	Pengetahuan tentang pengawasan eksternal	6.41	40	40	80	100	66
4	Pengetahuan tentang tindak lanjut atas produk pengawasan Ombudsman	6.09	100	100	100	100	95
5	Pengetahuan tentang kewajiban penanganan/pengelolaan pengaduan	4.81	80	100	80	80	80
Pengetahuan		42.45	53.47	67.25	82.87	97.73	74.18

A.2. Perencanaan, Jaminan Pelayanan dan Pengawasan Internal

No.	Indikator	Bobot	Hasil Penilaian (%)
1	Hasil penilaian masuk dalam indikator kinerja	7.80	0
2	Ketercapaian Program Prioritas terkait dengan pelayanan publik	3.92	80
3	Pelibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen perencanaan	3.79	40
4	Akuntabilitas atas dokumen perencanaan	2.91	60
5	Ketersediaan perencanaan atas sarana prasarana/fasilitas pelayanan publik	2.44	40
6	Persentase usulan program yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	2.07	20
7	Terpublikasinya SK Kompensasi secara elektronik dan non-elektronik	21.24	60
8	Frekuensi pengawasan oleh atasan langsung	13.38	40
Perencanaan, Jaminan Pelayanan dan Pengawasan Internal		57.55	44.98

B. DIMENSI PROSES

B.1. Standar Pelayanan

No.	Indikator	Bobot	Pelaksana	Penerima	Hasil Penilaian (%)
1	Waktu	24.36	90	100	95
2	Biaya	12.70	100	100	100
3	Sistem, mekanisme, dan prosedur	13.01	100	100	100
4	Persyaratan	11.80	95	100	97.5
Standar Pelayanan		61.87	95.11	100	97.56

Produk Layanan	
1	LAYANAN KEPERSETAAN BPJS KESEHATAN PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI)
2	IJIN PENGALANGAN DANA

B.2. Maladministrasi

No.	Indikator	Bobot	Hasil Penilaian (%)	Jumlah Responden	
				Wawancara	Via Link
1	Perilaku atau perbuatan melawan hukum	3.18	100.00	9	5
2	Berpihak	3.18	100.00		
3	Diskriminasi	3.18	100.00		
4	Konflik kepentingan	3.18	98.57		
5	Penyalahgunaan wewenang	3.18	100.00		
6	Kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum	3.18	100.00		
7	Penundaan berlarut	3.18	100.00		
8	Tidak memberikan pelayanan	3.18	100.00		
9	Tidak kompeten	3.18	100.00		
10	Penyimpangan prosedur	3.18	100.00		
11	Permintaan atau penerimaan imbalan	3.18	100.00		
12	Tidak patut	3.18	100.00		
Maladministrasi		38.16	99.67		

C. DIMENSI OUTPUT

Hasil Penilaian Eksternal

No.	Indikator	Bobot	Hasil Penilaian (%)
1	Capaian Program Prioritas Nasional/Indeks Pembangunan Manusia	50.00	60
2	Indeks Kepuasan Masyarakat/Standar Pelayanan Minimal	50.00	80
Hasil Penilaian Eksternal		100	70.00

* Untuk Kementerian Lembaga

- Data Capaian Program Prioritas Nasional dari Bappenas
- Data Indeks Kepuasan Masyarakat dari Kemenpan-RB

* Untuk Pemerintah Daerah

- Data Indeks Pembangunan Manusia dari BPS
- Data Standar Pelayanan Minimal dari Kemendagri

D. DIMENSI PENGADUAN

D.1. Komitmen

No.	Indikator	Bobot	Hasil Penilaian (%)
1	Tersedianya SK Pengelola Pengaduan	19.70	60
2	Lama penugasan sebagai pengelola pengaduan	16.66	80
3	Jumlah pengaduan yang diselesaikan	14.43	100
4	Waktu Penyelesaian Pengaduan	14.70	60
5	Keterpaduan sarana	9.15	40
Komitmen		74.64	69.75

D.2. Budaya

No.	Indikator	Bobot	Hasil Penilaian (%)
1	Terdapat kesesuaian hasil evaluasi pengaduan dengan penyempurnaan pelayanan	17.62	20
2	Frekuensi peningkatan pengetahuan pengelolaan pengaduan	7.74	60
Budaya		25.36	32.21

KEPERCAYAAN MASYARAKAT

No.	Indikator	Bobot	Hasil Penilaian (%)	Jumlah Responden	
				Wawancara	Via Link
1	Keandalan	20.73	81.33	0	10
2	Responsivitas	19.33	81.67		
3	Keadilan	18.27	87.67		
4	Integritas	23.17	68.67		
5	Keterbukaan	18.50	84.00		
Kepercayaan Masyarakat		100	80.11		

Total Nilai Kualitas Pelayanan Tahun 2025	74.41
---	-------

Dokumen terbatas yang penggunaan dan publikasinya harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan Ombudsman Republik Indonesia